

KEBIJAKAN PERTAHANAN KEAMANAN KOREA SELATAN DALAMMENGHADAPI ANCAMAN NUKLIR KOREA UTARA ANTARA TAHUN 2002-2012

Haikal Hasan Thalib

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : hekelsalto@gmail.com

ABSTRACT

North Korea's nuclear threat is one of the serious problems currently faced South Korea as North Korea's closest neighboring countries. The presence of a dark past history involved raises concerns about the nuclear threat from North Korea is likely to threaten the region and threaten the safety of its citizens. North Korea's nuclear threat is what makes the South Korean government did the various policies related to the security of South Korea's defense in the form of co-operation between the State, to make peace efforts against North Korea.

Keywords: *Threats, Nuclear North Korea, South Korea's Defense and Security Policy*

1. Pendahuluan

Korea Selatan adalah sebuah Negara yang terletak di wilayah Semenanjung Korea tepatnya di pojok Asia Timur Jauh. Korea Selatan merupakan salah satu Negara maju yang berada di kawasan Asia Timur selain

Jepang dan Cina. Letak geografis Korea Selatan yang cukup strategis dan berada diantara Negara-negara berkekuatan besar seperti Jepang, Cina, dan Rusia memaksa Korea Selatan untuk membuat kebijakan tersendiri terkait pertahanan keamanan negaranya. Terlebih wilayah

Semenanjung Korea berfungsi sebagai pintu invasi Cina, Rusia, Jepang, dan Amerika Serikat ketika Perang Dunia II. Terutama ketika Korea dikuasai Cina, dan Korea dianggap ancaman bagi Jepang, serta ketika Jepang menguasai Korea, dimana Korea juga dianggap sebagai ancaman bagi Rusia dan Cina.

Semenanjung Korea dianggap sebagai suatu kawasan strategis dalam hubungan internasional di Asia Timur dimana semenanjung Korea memiliki arti yang cukup penting dalam kepentingan nasional bagi keempat Negara besar seperti Cina, Jepang, Rusia dan Amerika Serikat serta untuk membentuk dan mempertahankan *balance of power* di wilayah Asia Timur. (Yang Seun & Mochtar Mas'oe'd, 2004 : 18-19)

Adanya pembagian Semenanjung Korea menjadi Korea Utara dan Korea Selatan membuat hubungan dua Korea menjadi bersitegang. Sejarah masa lalu mengingatkan bahwa Korea Utara ialah rival abadi sekaligus sebagai Negara tetangga terdekat Korea Selatan, membuat Korea Selatan mengambil

sikap untuk bersikap menjaga pertahanan keamanannya.

Kesiagaan Korea Selatan terkait pertahanan keamanannya mengalami peningkatan seiring dengan adanya pembangunan nuklir di Korea Utara yang semakin berkembang ke arah krisis nuklir sejak 2002 (KBS World : 2012). Perkembangan nuklir Korea Utara tersebut otomatis menjadi ancaman tersendiri bagi Korea Selatan yang wilayahnya berdekatan dengan Korea Utara. Terlebih persenjataan nuklir Korea Utara ini lama kelamaan semakin berkembang ke arah invasi yang membuat ketegangan di wilayah Semenanjung Korea semakin memanas.

Kondisi dan situasi yang penuh dengan ketegangan pasca pengembangan nuklir Korea Utara, membuat Korea Selatan berupaya mengambil sikap untuk menjaga dan mempertahankan diri dari ancaman nuklir Korea Utara terkait bidang pertahanan dan keamanan negaranya. Dimana pertahanan dan keamanan merupakan masalah penting dalam politik luar negeri

suatu Negara karena basis eksistensi bagi Negara guna mencapai tujuan-tujuan tertentu (Amien Rais : 68)

Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan mengenai Apa saja upaya yang dilakukan Korea Selatan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negaranya dari ancaman nuklir Korea Utara dalam 10 tahun terakhir (2002-2012).

2. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang kebijakan pertahanan dan keamanan Korea Selatan dalam menjaga pertahanan dan keamanan negaranya erat kaitannya dengan ketahanan nasional.

ketahanan nasional adalah kondisi suatu bangsa yang dinamis, yang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang datang dari luar dan dalam yang langsung atau tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan hidup serta tujuan

perjuangan nasional dari suatu bangsa dan Negara (Lemhamnas, 1984 : 48).

Selain melakukan upaya untuk meningkatkan ketahanan nasionalnya, Korea Selatan juga mengeluarkan kebijakan terkait kondisi pertahanan dan keamanan negaranya. Dimana pertahanan dan keamanan adalah upaya rakyat dengan menggunakan angkatan bersenjata sebagai inti dan fungsi utama pemerintah Negara dalam menegakkan ketahanan nasional. Adapun tujuannya yakni untuk mencapai keamanan bangsa dan Negara (Lemhamnas, 1984 : 67).

Landasan Teori

- Teori Security Dilemma

Untuk menjelaskan mengenai permasalahan diatas, penulis menggunakan paradigma realis. Dimana pengertian dari paradigma ialah suatu paradigma yang merupakan suatu aliran pemikiran yang mempunyai asumsi yang sama mengenai bidang studi, seperti persetujuan tentang kerangka konseptual, petunjuk yang metodologis dan teknis analisis (Mochtar Mas'ood, 1990 : 8).

Perspektif realis berpendapat bahwa adanya peningkatan kekuatan militer adalah suatu hal yang wajar dalam sistem internasional yang anarki, dimana tujuan Negara ialah untuk lebih mempertahankan diri dan melindungi kepentingan nasionalnya dari pada hanya mempertahankan suatu perdamaian. Negara dan tindakannya tidak dibatasi oleh suatu institusi internasional yang mengakibatkan setiap negara harus mempertahankan diri dari ancaman ataupun serangan dari negara lain serta mementingkan kepentingan negaranya (kepentingan nasional) diatas kepentingan negara lain. Upaya yang biasanya dilakukan adalah dengan meningkatkan kekuatan militer, membentuk suatu aliansi militer, melakukan hubungan kerjasama dan langkah-langkah lainnya. Dari sini muncul suatu lingkaran yang menimbulkan potensi konflik atau disebut lingkaran setan, dimana upaya tersebut dianggap sebagai ancaman oleh negara lain. Gejala ini kemudian disebut dengan security dilemma dalam hubungan antar Negara di dunia. (tiopurwanto, 2008 : 8)

Sementara menurut Kenneth Waltz, negara yang rasional hidup dalam keadaan negara yang anarki, dimana dilema keamanan akan menimbulkan kecurigaan dan sikap saling bermusuhan satu sama lainnya karena ketegangan hubungan mereka, walaupun bukan pemikiran yang sebenarnya. Realisme baru juga menggambarkan tentang perlunya diplomasi yang seimbang dari pentingnya perspektif "Balance of Power" untuk keamanan nasional. Waltz juga memperingatkan semua negara terhadap kedua "ancaman praktis" dan "potensi ancaman", karena dalam dilema keamanan, "... kebijakan yang diambil oleh satu negara untuk meningkatkan keamanan sendiri berarti langkah-langkah terhadap penurunan keamanan pihak lain (XIN Benjian : 2001).

Untuk itu, Negara juga seharusnya berupaya untuk mempertahankan dirinya dari serangan Negara lain dan mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan

Negara lain yang berdasarkan prinsip self help (pertolongan terhadap diri sendiri)..Dimana dalam menjaga dan meningkatkan keamanannya, suatu Negara dapat mengupayakan langkah-langkah yang dapat mengakibatkan berkurangnya keamanan di Negara lain serta dapat mengganggu keamanannya. Negara-negara yang terancam keamanannya tersebut tentunya akan mengambil tindakan untuk menjaga keamanannya yang kemudiandapat mengancam balik keamanan Negara pertama (Amien Rais : 1989 : 68-69).

Oleh karena itu, adanya perlombaan senjata yang tidak stabil dan tidak terkendali oleh Negara-negara yang bekerjasama tersebut, membuat Negara-negara yang lain terjebak dalam ketakutan dan membuat semua pihak merasa terancam dan berupaya untuk mempersenjatai diri untuk menghindari ancaman. Upaya Negara-negara untuk saling bersaing inilah yang mengakibatkan pertumbuhan perlombaan senjata dan menciptakan dilema keamanan (Walter S. Jones, 1993 : 196-197).

Dalam kasus Korea Selatan dapat dikatakan bahwa adanya peningkatan terkait pengembangan nuklir di Korea Utara secara tidak langsung membuat Korea Selatan merasa terancam dan berupaya untuk meningkatkan persenjataan dan keamanannya yang mana hal ini terjadi akibat adanya pemikiran security dilemma serta untuk menjaga perdamaian dan keamanan di negaranya dan di kawasan semenanjung Korea.

3. Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini menggunakan Teknik *Library Research* atau Studi Pustaka.Sumber data diambil dari beberapa buku, dokumen-dokumen resmi dan jurnal-jurnal, serta dilengkapi informasi yang didapat dari internet. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menjelaskan dengan menggambarkan berdasarkan data – data yang adasecara obyektif, apa adanya tanpa ada pengaruh subyektifitas penulis, danmenjelaskan variabel –

variabel yang dibangun dari data – data yang ada sehinggadiperoleh hubungan satu sama lainnya untuk sampai pada suatu kesimpulan.

4. Situasi Dua Korea (Korea Selatan dan Korea Utara)

Situasi dan kondisi kedua Korea saat ini tidak terlepas dari hubungan sejarah di masa lalu. Di masa lalu Korea Selatan dan Korea Utara sudah terlibat konflik sejak terbaginya Semenanjung Korea menjadi dua Negara. Perbedaan ideologi merupakan salah satu penyebab utama dari konflik dua Korea. Dimana Korea Selatan dipengaruhi oleh pemikiran liberal Amerika Serikat sedangkan Korea Utara dipengaruhi pemikiran komunisme Uni Soviet. Perbedaan ideologi ini bahkan menimbulkan pecahnya perang Korea pada 1950 yang merupakan cikal bakal terjadinya konflik kedua Korea, hingga pada akhirnya dilakukan perjanjian gencatan senjata pada 1953. (Yang Seun & Mochtar Mas'oe'd, 2004 : 22) Akan tetapi, adanya perjanjian

gencatan senjata tersebut tetap membuat kedua Korea terus berkejaran. Korea Selatan bahkan menganggap jika Korea Utara adalah wilayah teritorialnya yang harus kembali sedangkan Korea Utara menganggap Korea Selatan ialah wilayah yang perlu dikomunikasikan. Perbedaan antar kedua Korea terus terjadi bahkan hingga saat ini, dimana perbedaan kini mencakup prinsip dalam bidang ekonomi, politik, nilai masyarakat, bahkan bahasa. Perbedaan-perbedaan tersebutlah yang membuat hubungan kedua Korea semakin meruncing sehingga menjadi permusuhan.

Dalam kasus nuklir Korea Utara dimana isu nuklir Korea Utara awalnya terjadi pada awal tahun 1990an ketika proyek pengembangan senjata nuklir rahasia Korea Utara terbongkar dan menyebabkan krisis nuklir Korea Utara putaran pertama. Tahun 1995, Korea Utara membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat yakni perjanjian Jenewa dan untuk menghentikan pengembangan senjata nuklirnya. Akan tetapi, Korea

Utara kembali melakukan proyek program pengembangan nuklir secara rahasia pada tahun 2002, dan kembali diketahui oleh Amerika Serikat sehingga memicu krisis nuklir Korea Utara putaran kedua. (KBS World Radio : 2012)

Adanya pengembangan nuklir di Negara tetangganya, membuat Korea Selatan dan Korea Utara terlibat permusuhan dan persaingan terkait perlombaan senjata dan bersikap saling waspada satu sama lain bahkan hingga saat ini. Dimana hal inilah yang membuat Korea Selatan pada akhirnya membuat kebijakan terkait pertahanan keamanan untuk mengantisipasi ancaman nuklir Korea Utara.

4.1 Keadaan Militer Korea Selatan

Tujuan militer Korea Selatan semenjak berakhirnya Perang Korea pada tahun 1953, ialah untuk mencegah perang di kawasan Semenanjung Korea serta menjaga keseimbangan perdamaian wilayah Asia Timur dan Pasifik Barat. Dimana tujuan utama dari militer Korea Selatan adalah untuk meningkatkan

hubungan militer dengan Amerika Serikat dan untuk membentuk pertahanan nasional yang mandiri. (Yang Seung Yoon & Mochtar Mas'ood : 2004 : hal 22)

Meskipun demikian, Korea Utarayang secara statistik kekuatan militernya berada jauh dibawah Korea Selatan, tetap berani dan merasa mampu untuk memberikan reaksi atau gertakan terhadap Korea Selatan. Reaksi tersebut berupa penutupan perbatasan dan aktif dalam peluncuran rudal yang dilakukan pihak militer untuk menyampaikan keberaniannya terhadap Korea Selatan. Kondisi dan situasi tersebut yang membuat Korea Selatan masih membutuhkan upaya dan bantuan untuk terus meningkatkan kekuatan militernya.

Hal tersebut berkaitan erat dengan kepentingan nasional dari Korea Selatan sendiri serta terkait dengan security dilemma yang mana peningkatan persenjataan dan keamanan akibat adanya ancaman terhadap perkembangan senjata Korea Utara serta untuk menjaga pertahanan dan keamanan negaranya dari ancaman luar.

Situasi itulah yang membuat pemerintah Korea Selatan untuk membuat beberapa kebijakan terkait pertahanan dan keamanan wilayahnya baik dengan cara meningkatkan militernya, melakukan kerjasama, serta melakukan upaya perdamaian dengan Korea Utara.

4.2 Respon Korea

Selatan Terhadap Nuklir Korea Utara

- Awal Mula Pengembangan Nuklir Korea Selatan

Dalam merespon ancaman dari nuklir Korea Utara, Korea Selatan melakukan dua tindakan, yaitu meminta jaminan payung nuklir dari Amerika Serikat dengan mempererat hubungan aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan serta meningkatkan kapabilitas pertahanan konvensional. Namun adanya peningkatan nuklir Korea Utara dari tahun ke tahun memaksa Korea Selatan untuk mulai mengembangkan program misil dan nuklir untuk menghadapi ancaman Korea Utara. Program misil dan nuklir Korea

Selatan dimulai sejak tahun 1970an, dimana Korea Selatan pada tahun 1978 lewat *Agency for Defence Development* yang berhasil mengubah jangkauan misil Nike-Hercules menjadi misil balistik dengan jangkauan 150-250 km. Hal itu membuat Amerika Serikat mengeluarkan memorandum yang membatasi jangkauan misil Korea Selatan agar hanya mencapai 180 km pada tahun 1979. Korea Selatan terus mengembangkan misil balistiknya cara melakukan uji coba Hyon MU NHK-A sejak tahun 1990an. Korea Selatan juga melakukan upaya untuk melepaskan diri dari memorandum yang dikeluarkan oleh AS dengan berniat untuk bergabung dengan *Missile Technology Control Regime* (MTCR) pada tahun 1995. Di era pemerintahan Kim Dae Jung, Korea Selatan mendirikan *Committee for the Promotion of Defense Reform* dan mengeluarkan *Five-Year Defense Reform Plan* sesuai dengan *Basic Defense Policy Report* pada April 1998. Dimana tujuan dari didirikannya komite tersebut adalah guna menciptakan kemampuan angkatan

bersenjata yang kuat, memperluas teknologi informasi persenjataan militer, dan membangun angkatan bersenjata yang rasional, efektif, dan ekonomis. Oleh karena itu, untuk melaksanakannya, Presiden Korea pada saat itu, Kim Dae Jung, melakukan beberapa hal diantaranya mendukung upaya reformasi organisasi dengan menciptakan sistem komando nasional di bidang transportasi, biokimia, dan pertahanan nuklir, memfokuskan perhatian pada aplikasi teknologi informasi terkini di sektor pertahanan serta mempercepat akuisisi aset pertahanan yang berkaitan dengan kapabilitas serangan dan kemampuan perang. Hal tersebutlah yang mendasari proyek pengembangan nuklir Korea Selatan sebagai upaya untuk menghindari ancaman nuklir Korea Utara (Alfina Farmaritia Wicahyani, 2010 : 69-70).

Selain mengembangkan nuklir, Korea Selatan juga menerapkan beberapa kebijakan terkait upaya untuk menjaga pertahanan dan keamanan negaranya. Dimana Korea Selatan menerapkan

kebijakan tersebut berdasarkan dua level ancaman nasionalnya, yaitu :

1. Runtuhnya keseimbangan kekuatan internasional di kawasan Asia Timur
2. Adanya ancaman dari Korea Utara terhadap keamanan di Negara Korea Selatan (Yang Seung-Yoon & Mochtar Mas'ood : 2004 : 19)

Adapun kebijakan Korea Selatan terkait pertahanan dan keamanan negaranya pada saat ini, tidak hanya mengandung unsur militer, namun juga dengan caramelalui hubungan kerjasama, dan melakukan upaya-upaya perdamaian.

Hal ini didasari oleh adanya security dilemma dan kepentingan nasional terkait keamanan Korea Selatan sendiri serta adanya pengaruh pemikiran dari balance of power. Berikut ini penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan pertahanan keamanan Korea Selatan berdasarkan era pemerintahan presidennya dari tahun 2002 sampai 2012.

A. Kebijakan Era Pemerintahan

Kim Dae Jung (2002-2003)

- Menaikkan anggaran pertahanan Korea Selatan pada tahun 2003 sebagai fokus pada pembangunan teknologi dan informasi militer serta sebagai persiapan untuk menghadapi ancaman dari Korea Utara di masa yang akan datang (Alfina Farmaritia Wicahyani, 2010 : 71).
- Membuat kebijakan sunshine policy (matahari bersinar) yang merupakan kebijakan yang menawarkan bantuan kepada Korea Utara sebagai usaha agar tercapainya rekonsiliasi. Kebijakan ini bertujuan baik yaitu untuk mencapai perdamaian dan keuntungan bersama kedua Negara, dengan cara memberikan bantuan ekonomi yang bertujuan agar rakyat dan pemerintah Korea Utara dapat mengubah sikap serta mau membuka hubungan kerjasama

internasional (Yang Seun & Mochtar Mas'ood, 2004 : 41-43).

B. Kebijakan Era Pemerintahan

Roo Moo Hyun (2003-2008)

Dalam mengatasi ancaman nuklir dari Korea Utara, Roo Moo Hyun menggunakan tiga prinsip, yaitu dengan cara tidak mentolerir nuklir Korea Utara, menggunakan pendekatan lewat jalur damai dan secara diplomatik, serta meyakinkannya dengan proaktif (Alfina Farmaritia Wicahyani, 2010 : 74) Adapun kebijakan Roo Moo Hyun, diantaranya:

- Menyusun rancangan Reformasi Pertahanan 2020 yang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan pertahanan nasional lewat penciptaan struktur teknologi militer intensif dan kapabilitas pertahanan untuk masa depan (Alfina Farmaritia Wicahyani, 2010 : 71).
- Melakukan *engagement* terhadap Korea Utara lewat kebijakan perdamaian dan kesejahteraan

yang juga merupakan kelanjutan dari sunshine policy. Cara yang ditempuh yakni dengan tetap melakukan hubungan dengan Korea Utara lewat bantuan ekonomi tanpa syarat yang diberikan. Disini Presiden Roo Moo Hyun tidak begitu mempermasalahkan persoalan krisis nuklir Korea Utara yang sewaktu-waktu dapat mengancam Korea Selatan(Widyarka Ryananta : 2003).

C. Kebijakan Era Pemerintahan Lee Myung-bak (2008-2012)

- Militer Korea Selatan bergabung dalam prakarsa keamanan proliferasi atau Proliferation Security Initiative (PSI) pada tahun 2010 yang diprakarsai oleh Amerika Serikat. Melalui payung PSI, Korea Selatan berhak untuk mencegat kapal-kapal Korea Utara yang diduga membawa bahan-bahan persenjataan nuklir dan rudal. Kebijakan PSI ini ditempuh Korea Selatan karena

militer Korea Utara menolak untuk menghentikan pengembangan teknologi nuklir dan rudal(Era Baru : 2010).

- Menambah jumlah tentara di lima pulau di dekat perbatasan dengan Korea Utara ketika situasi ketegangan kedua Negara meningkat pada tahun 2010. Keputusan tersebut diumumkan setelah rapat darurat kabinet Korea Selatan pasca serangan artileri Korea Utara ke pulau dekat perbatasan yang menewaskan dua tentara dan dua warga sipil(BBC : 2012).
- Membuat Aliansi Pertahanan Keamanan Dengan Amerika Serikat. Korea Selatan dan Amerika Serikat. Tujuannya yakni ketika Korea Utara melakukan provokasi, Korea Selatan akan merespon dengan kekuatan sendiri, dan pasukan Amerika Serikat akan berusaha meningkatkan dukungan pertahanan(KBS World: 2011).

- Membangun Kerjasama Militer Antara Korea Selatan dan Jepang. Hubungan kerjasama antara Korea Selatan dan Jepang dalam bidang pertahanan bertujuan untuk memperbaiki hubungan kedua Negara yang di masa lalu sangat sensitif serta agar mempengaruhi situasi di Semenanjung Korea agar lebih stabil (KBS World: 2011).
- Mempertimbangkan pemasokan kembali senjata nuklir taktis pada tahun 2011. Kebijakan ini disebabkan perlindungan payung nuklir dari Amerika Serikat dianggap belum cukup untuk dapat menghentikan ancaman nuklir Korea Utara. Fungsi dari senjata nuklir taktis ini yaitu untuk memberikan ancaman kepada musuh namun tetap mudah digunakan dalam medan perang dan mempunyai kekuatan yang relatif tidak besar (KBS World: 2011).
- Melakukan perundingan nuklir dengan Rusia pada Februari 2012 menyusul kematian Kim Jong-il sang pemimpin Korea Utara. Korea Selatan dan Rusia sepakat bekerjasama menciptakan kondisi agar Korea Utara mau melanjutkan perundingan denuklirisasi di wilayah Semenanjung Korea (KBS World: 2012).
- Merencanakan kebijakan reunifikasi Korea (penyatuan kedua Korea) dengan cara mempersiapkan reunifikasi dan pendanaan lewat Kementerian Unifikasi. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan perdamaian antar kedua Korea dan pembentukan komunitas satu bangsa (Tempo : 2012).
- Melakukan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat untuk pertama kalinya pada awal Maret 2010, sebagai respon terhadap tenggelamnya sebuah kapal angkatan laut Korea Selatan oleh Korea Utara. Dimana Korea Utara

dianggap meluncurkan torpedo dari kapal selamnya untuk menenggelamkan kapal tersebut (Era Baru : 2010).

- Melakukan upaya denuklirisasi Korea yang diadakan dengan Amerika Serikat dan bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan kestabilan di kawasan Semenanjung Korea (KBS World : 2012).
- Melakukan Konferensi Tingkat Tinggi dengan Cina pada 9 Januari 2012, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas keamanan regional pasca wafatnya Kim Jong Il dan bekerja sama dalam mencapai denuklirisasi, perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea (KBS World : 2012).
- Melaksanakan pertemuan segi enam (*six party talks*) yang melibatkan Korea Selatan, Korea Utara, Amerika Serikat, Cina, Jepang, dan Rusia yang isinya menerapkan kesepakatan agar

Korea Utara mengambil tindakan untuk menuju tujuan akhir, pembuangan fasilitas nuklir dengan imbalan bahwa lima peserta lain akan bersikap responsif dan mau memberikan bantuan kepada Korea Utara. Dalam pertemuan ini, peserta dari Negara-negara lain juga mendukung terhadap upaya denuklirisasi Korea dan normalisasi hubungan Korea Utara dengan Jepang dan Amerika Serikat serta bersama-sama menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Timur Laut (KBS World Radio).

5. Kesimpulan

Kebijakan-kebijakan Korea Selatan dalam peningkatan keamanan dan persenjataan tentunya memiliki tujuan untuk melindungi serta untuk menjaga pertahanan dan keamanan negaranya dari ancaman dan serangan nuklir Korea Utara.

Kebijakan tersebut merupakan salah satu perwujudan dari pemikiran security dilemma yang mana upaya Korea Selatan dalam meningkatkan persenjataan dan keamanannya merupakan bukti ketakutan Korea Selatan terkait perkembangan nuklir Korea Utara.

Dari ketiga era pemerintahan Korea Selatan, dapat dilihat bahwa pada era Lee Myung-bak kebijakan Korea Selatan lebih konservatif dan cenderung lebih tegas dalam menghadapi ancaman dari Negara tetangga, Korea Utara. Dimana sikap konservatif dan tegas Lee Myung-bak tersebut, akibat adanya desakan dari sekutu utamanya yakni Amerika Serikat yang sebenarnya memperkeruh hubungan dengan Korea Utara saat ini. Dimana Lee tidak meneruskan kebijakan Sunshine Policy para pendahulunya dan menggantinya dengan kebijakan pintu terbuka 3000, yang dianggap masyarakat Korea Utara sangat tidak adil dan sarat akan nuansa politis.

Pengaruh hubungan kedua Korea saat ini tentunya berdampak pada status

keamanan Korea Selatan sebagai Negara tetangga terdekat terkait ancaman nuklir Korea Utara. Sehingga membuat ketegangan antara dua Korea semakin menjadi-jadi, dimana sebagai buktinya yakni adanya serangan rudal yang sering dilancarkan oleh Korea Utara. Untuk itu sebaiknya dalam menerapkan kebijakan pertahanan keamanan ssebaiknya Korea Selatan juga mempertimbangkan dampak yang terjadi terhadap situasi dan hubungan dengan Korea Utara sebagai Negara tetangga. Korea Selatan seharusnya lebih berupaya untuk bersikap defense atau bertahan serta lebih melakukan pendekatan perdamaian dan memberikan bantuan kemanusiaan ke Korea Utara untuk menciptakan perdamaian serta stabilitas di kawasan Semenanjung Korea.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Yang, S.-Y, & Mas'oe'd, M. (2004). *Politik luar negeri Korea Selatan: Penyesuaian diri terhadap masyarakat internasional.*

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Jones, W. S. (1993). *Logika Hubungan Internasional : Kekuatan Ekonomi Politik Internasional dan Tatanan Dunia 2*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mas'ud, M. (1990). *Ilmu hubungan internasional: Disiplin dan metodologi*. Jakarta: LP3ES.

Rais, M. A. (1989). *Politik Internasional Dewasa Ini*. Surabaya: Usaha Nasional.

Jurnal :

Benjian, X. (2001). *Security Dilemma, Balance of Power Vs. US Policy Towards China in the Post-Cold War Era* page 4-5. Dalam Kenneth Waltz, *Theories of International Politics (Chinese Translation)*, University of People's Public Security Press, 1992, p.3

Farmaritia, A. W. (2010). *Dampak Pengembangan Nuklir Korea Utara Terhadap Kompleksitas Keamanan Regional Asia Timur*. Hal 71 – 75. Diunduh tanggal 5 Maret dari journal <http://lontar.ui.ac.id/file?=digital/13275-T%2027803-Dampak%20pengembangan-Analisis.pdf>

Puwanto, T. (2007). *Implikasi Kapabilitas Militer Cina Terhadap Stabilitas Keamanan Asia Timur*. Hal 8. Dalam Kenneth N. Waltz, *Theory of international politics*, Reading Mass: Addison Wesley, 1979, hal 118. Diunduh tanggal 5 Maret 2012 dari journal <http://publikasi.ummy.ac.id/index.php/hi/article/viewFile/380/1303>

News :

BBC. (2010). *Korea Selatan akan tambah pasukan di perbatasan*, diunduh tanggal 5 April 2012 dari www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2010/11/101124_konflik_korea.shtml

Era Baru. (2010). *AS-Korea Selatan Pamer Kekuatan Militer*, diunduh tanggal 6 April 2012 dari <http://erabaru.net/top-news/39-news4/15874-as-korea-selatan-unjuk-kekuatan-militer-korea-utara-membisu->

Era Baru. (2010). *Korsel Berusaha Jadi Penyelenggara Latihan Anti-Proliferasi, Oktober*, diunduh tanggal 6 April 2012 dari <http://erabaru.net/internasional/35-internasional/14731-korsel-berusaha-jadi-penyelenggara-latihan-anti-proliferasi-oktober>

Global Fire Power. (2012). *Compare Countries Between South Korea and North Korea*, diunduh tanggal 7 April 2012 dari www.globalfirepower.com

KBS World Radio. (2012). *Isu Nuklir Korea Utara*, diunduh tanggal 10 Maret 2012 dari http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/faq_01.htm

Ryananta, W. (2003). *Ancaman Krisis Nuklir Korea Utara dan Sikap UE*, diunduh tanggal 24 Maret 2012 dari <http://www.indonesianmission-eu.org/website/page203736492200309126625197.asp>

Tempo. (2012). *Seoul Siap Berdialog dengan Pyongyang*, diunduh tanggal 6 April 2012 dari <http://www.tempo.co/read/news/2012/01/06/115375644/Seoul-Siap-Berdialog-dengan-Pyongyang>